



Sinergitas Peran Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang

(The Synergy of Village Government's Role and Community Participation in the Process of Development Planning in Sidenreng Rappang District)

**Ahmad Mustanir¹, Fitriani S¹, Khaeriyah Adri¹,
Andi Ayu Nurnawati¹, Goso Goso²**

¹Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

²Universitas Muhammadiyah Palopo

Email Correspondence: ahmadmustanir_74@umsrappang.ac.id

Abstract

This research examines the role of village government, community participation, and their influences on development planning in Timoreng Panua village, Panca Rijang subdistrict, Sidenreng Rappang District, South Sulawesi. This research employed descriptive quantitative method, and involved samples of 55 households out of population of 745 households. The samples were taken randomly by using Yount formula 10%. Data was collected through observation, questionnaires and documentation, and analysed through tabulation, frequency and linear regression analysis by using SPSS 21.0 for Windows. The results show that the percentage of the role of village government contributing to the Timoreng Panua village development planning reached 52,4% (considered as 'sufficient involvement'), while the percentage of community participation to the development planning is 77% (considered as 'enthusiastic'). Together, the joint roles of village government and community participation contributed to village development planning with a figure of 78,4%, categorized as 'playing a significant role'.

Keywords: *community participation, government role, development planning*

Pendahuluan

Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh pemerintah desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkat pemerintah, khususnya pemerintahan

desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Agar program pemerintah efektif maka perlu adanya manajemen pemerintahan dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih baik, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan masyarakat di dalam perencanaan pembangunan desa memang benar-benar sangat dibutuhkan untuk mensinkronkan rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan dan penghidupannya di desa. Karena bila tidak demikian, bisa saja pembangunan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sia-sia belaka dan masyarakat sendiri pun akan bersifat apatis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.

Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Pembangunan tidak pernah tercapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat, pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar-menawar antar kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang masalah yang dijumpai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yaitu ketidakmampuan pemerintah desa atau kepala desa untuk mengaktifkan dan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dalam proses perencanaan pembangunan kurangnya pemikiran untuk memecahkan masalah, kurangnya sumbangsih pemikiran masyarakat untuk pemecahan masalah jalan yang rusak, kurangnya motivator kepada masyarakat untuk memberikan partisipasi pikiran ataupun tenaga dalam proses pembangunan. Selain hal tersebut kurangnya fasilitasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan minimnya jalinan komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat. Serta kurangnya sumbangsih masyarakat berupa uang atau barang terhadap perencanaan pembangunan karena mereka bergantung pada dana desa.

Tinjauan Pustaka

Pemerintah Desa

Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja orang yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan yang menurut Surianingrat dalam (Faried, 2015) sebagai sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tidak saja diarahkan pada pemerintahan yang berdaulat dan yang tidak berdaulat. Pengertian tentang “pemerintahan” sebagaimana dirumuskan adalah suatu pengertian yang berlaku umum, namun yang paling memberikan arahan pemikiran terhadap pemerintahan sebagai studi, sebagai suatu hal yang dipelajari, dan sebagai suatu ilmu pengetahuan, bahwa pengertian tersebut sangat relevan dengan kebutuhan pemahaman terhadap pemerintahan yang berdaulat.

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban (Hanif, 2011).

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Indikator Peranan Pemerintahan Desa

Indikator Peranan Pemerintahan Desa Menurut (Gito Saputro & Rangga, 2015) :

a. Peranan sebagai pemecah masalah (*problem solving*)

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu atau masyarakat tidak dapat terlepas dari masalah. Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Untuk menggapai harapan tersebut, setiap individu atau masyarakat harus mencari jalan keluarnya atau mencari pemecahan sebagaimana semetinya. Seorang agen perubahan seharusnya bisa berperan dalam mencari jalan keluar atau pemecah masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Agen perubahan adalah para pekerja profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan pengambilan

keputusan, inovasi orang lain (masyarakat) selaras dengan anjurannya. Dalam menangani masalah, sebaiknya seorang agen perubahan dapat:

- 1). Membatasi permasalahan atau ruang lingkup masalah
- 2). Menganalisis masalah yang menjadi lebih sederhana dan lebih rinci
- 3). Memilih metode berfikir yang tepat.

Langkah-langkah pemecahan masalah yang muncul dalam masyarakat anatara lain:

- a) Identifikasi masalah, masalah sering diartikan sebagai perbedaan antara kondisi dengan masalah yang sebenarnya dengan kondisi yang sering kita harapkan. Dengan demikian masalah akan selesai apabila keinginan dan harapan dapat tercapai. Namun demikian langkah paling awal adalah perlunya mengetahui adanya masalah. Kita harus mampu mengidentifikasi masalah berdasarkan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Oleh karenanya harus melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi tersebut. Melalui para tokoh atau melibatkan seluruh warga melalui curah pendapat, kita inventarisir semua permasalahan yang mereka kemukakan. Apabila permasalahan terlalu banyak, maka harus kita pilih dan kita sepakati masalah mana yang perlu di prioritaskan.
- b) Mendeteksi penyebab masalah, berbagai masalah yang kita temukan mesti ada penyebabnya dan kita harus mencari penyebab masalah tersebut melalui berbagai teknik termasuk teknik urun rembu atau sumbang saran. Penyebab masalah dapat kita kelompokkan menjadi penyebab langsung atau tidak langsung.
- c) Menyusun rencana penanggulangan. Rencana penanggulan yang dimaksud untuk menentukan jenis intervensi atau program yang perlu dilakukan. Rencana ini harus disusun dengan melibatkan masyarakat setempat, penyebab masalah yang paling dominan harus diprioritaskan untuk ditanggulangi (Gito Saputro & Rangga, 2015) (Kholifah R and Mustanir 2019).

b. Peranan sebagai fasilitator

Fasilitator adalah orang yang berperan memfasilitasi atau menyediakan fasilitas, membantu dan memudahkan anggota kelompok atau masyarakat untuk menghadapi permasalahan. Agen perubahan harus mampu memfasilitasi terjadinya aktivitas atau pertemuan-pertemuan yang mengarah pada pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dimulai dari memfasilitasi upaya identifikasi kebutuhan masyarakat, menuntun masalah, menetapkan tujuan yang ingin di capai, sampai penetapan cara mencapai tujuan. Agen perubahan harus mampu memfasilitasi terjadinya pertemuan anggota masyarakat dengan pihak-pihak terkait dalam memecahkan kebutuhan hubungan yang terjadi. Dengan demikian agen perubahan harus mampu menjadi mengkreasi terjadinya kontak atau forum-forum pertemuan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga terkait agar dapat menghilangkan perbedaan yang ada.

Sebagai fasilitator, seorang agen pembaharu harus memahami kondisi dan situasi masyarakat setempat sehingga apabila mereka menghadapi atau berhadapan dengan pihak lain tidak lagi merasa minder. Oleh karena seorang agen pembaharu harus mampu menumbuhkan rasa percaya diri pada semua anggota masyarakat (Gito Saputro & Rangga, 2015) (Akhmad, Mustanir, and Ramadhan 2018).

c. Peranan sebagai penghubung sistem

Kehidupan bermasyarakat sebagai suatu sistem tidak terlepas adanya bagian sub sistem yang saling terkait, saling memerlukan, saling melengkapi. Namun sering kali hubungan antar sub sistem yang ada kurang harmonis. Demikian halnya kelompok masyarakat sebagai suatu sistem akan selalu berhubungan dalam sistem yang lebih luas. Agen perubahan harus mampu menjalankan peranan sehingga hubungan antar sistem dapat berjalan. Peranan agen pembaharu sebagai penghubung antar sistem mengacu pada seorang komunikator. Masyarakat sebagai suatu sistem akan selalu berhadapan dengan pihak lain sebagai bagian sistem yang berbeda dengan sistem masyarakat. Dalam upaya mencapai pembangunan, kadang kala hubungan antar sistem tidak berjalan, tidak harmonis atau bahkan mengalami hambatan (Gito Saputro & Rangga, 2015) (Saidiman et al. 2019).

d. Peranan sebagai motivator

Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Motivasi dapat berasal dari dalam diri atau luar. Dengan demikian peranan agen perubahan sebagai agen motivator harus mampu mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan, serta mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan. Peranan agen perubahan dalam proses perubahan adalah mampu membangkitkan kebutuhan untuk berubah. Masyarakat umumnya lebih menyukai bersifat statis meskipun kestabilan tersebut bermakna negatif. Agen perubahan harus mampu menjelaskan bahwa perubahan di luar sistem telah terjadi begitu pesat, dengan demikian masyarakat akan terdorong untuk mau berubah dan perubahan tersebut diarahkan ke perubahan yang bersifat positif. Motivasi seseorang akan muncul seiring dengan meningkatnya kebutuhan seseorang. Kebutuhan manusia menurut teori Maslow dapat dibedakan dari beberapa tingkatan, dari kebutuhan dasar atau kebutuhan fisik, kebutuhan rasa, kebutuhan untuk dicinta dan rasa ingin memiliki, kebutuhan hormat, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Semakin meningkat kebutuhan manusia akan menjadi sumber menjadi sumber motivasi seseorang. Oleh karena itu sebagai agen perubahan harus mampu menumbuhkan dan mendefinisikan kebutuhan masyarakat (Gito Saputro & Rangga, 2015) (Damis Dadda et al. 2019).

e. Peranan sebagai komunikator

Komunikator adalah orang yang berprakarsa atas terjadinya proses komunikasi. Komunikator akan menyampaikan pesan kepada komunikan, pesan yang disampaikan merupakan informasi atau inovasi baru yang dapat diterapkan dalam pembangunan. Komunikan adalah orang yang diharapkan menjadi penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Proses komunikasi dianggap berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator dimengerti dan menimbulkan efek kepada komunikan yang sesuai dengan harapan komunikator. Agen perubahan sebagai komunikator harus mampu menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat mau dan mampu menerapkan pesan tersebut sesuai dengan harapan agen perubahan. Oleh karenanya agen pembaharu harus menguasai teknik komunikasi yang baik, komunikator harus mampu meramu pesan pembangunan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat. Oleh karenanya agen perubahan yang baik selayaknya menguasai bahasa yang digunakan oleh masyarakat (termasuk bahasa daerah) (Gito Saputro & Rangga, 2015) (Mustanir et al. 2019).

Pesan pembangunan yang seharusnya disebarakan oleh masyarakat juga harus diseleksi, tidak semua pesan pembangunan harus disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Agen pembaharu harus mampu menjadi filter pesan pembangunan, pesan pembangunan harus memenuhi kriteria layak sebagai pesan pembangunan. Sebagai suatu inovasi, pesan pembangunan harus memenuhi 5 sifat utama yakni : adanya keuntungan relatif, keterhubungan dengan nilai-nilai, kebutuhan klien, dan inovasi yang dikenal sebelumnya, tingkat kerumitan yang rendah, mudah dicoba dan diamati. Pesan pembangunan juga harus dikemas dalam bahasa atau cara penyampaian kepada klien disajikan semenarik mungkin sehingga bantuan media akan sangat membantu baik bersifat visual, audio atau audio visual.

Sasaran pembangunan masyarakat adalah seluruh lapisan masyarakat yang heterogen, mereka memiliki karakter yang beragam pula. Oleh karenanya sebagai agen perubahan harus mampu memahami semua karakter klien, baik itu tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, budaya, bahasa, kepercayaan atau nilai-nilai yang diyakininya. Agen pembaharu harus mampu memilih berbagai karakter masyarakat yang menghambat atau mempercepat perubahan yang kita harapkan. Pendekatan yang harus dilakukan kepada setiap golongan tersebut juga tidak sama, yang paling penting adalah bahwa pada akhirnya semua lapisan atau golongan masyarakat mau menerima dan melakukan perubahan demi perbaikan mutu hidupnya.

Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Isbandi dalam (Mustanir, Abadi, and Nasri 2016) (Latif et al. 2019) bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan atau keikutsertaan seseorang masyarakat dalam proses interaksi sosial,

pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat dalam situasi tertentu, baik dalam pengambilan keputusan (solusi) menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan proses keterlibatan masyarakat di dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi

Bornby dalam (Mardikanto & Poerwoko, 2015) (Mustanir and Yasin 2018) misalnya, mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan (Mardikanto & Poerwoko, 2015). Sedangkan Verhagen dalam (Mardikanto & Poerwoko, 2015) (Irwan et al. 2019) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat.

Menurut Sumarto dalam (Fadil, 2013) bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar stakeholders sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi.

Menurut (Mardikanto & Poerwoko, 2015) (Mustanir, Dema, et al. 2018) Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka, artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menunjuk keterlibatan masyarakat yang akan di perbaiki mutu hidupnya.

Menurut Adisasmita dalam (Fadil, 2013) Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan .

Menurut (Isbandi, 2007) partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Sedangkan (Adisasmita, 2006) dan Slamet dalam (Mustanir, Lubis, and Barisan 2017) partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program pengembangan yang dilakukan di dalam masyarakat.

Menurut Suryono dalam (Mustanir, Yasin, et al. 2018) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut serta masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta pemanfaatan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pengertian partisipasi masyarakat menurut Isbandi dalam (Mustanir and Razak 2017) mengemukakan tentang lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Menurut Schiller dan Antlov dalam (Zainuddin, 2017) tujuan dari partisipasi masyarakat adalah membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Sedangkan manfaat yang didapat menurut Westra dalam (Andreeyan, 2014) manfaat partisipasi, antara lain lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar dan dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.

Manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi masyarakat, sebagaimana pendapat ahli menurut Westra dalam (Zainuddin, 2017) manfaat partisipasi, antara lain: (a) Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar; (b) dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat; (c) dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*human dignity*), dorongan (motivasi) serta membangun kepentingan bersama; (d) lebih mendorong orang untuk bertanggung jawab; (e) memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja; (f) lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan (Uceng et al. 2019).

Daniels dan Walker (2005): Masyarakat harus memiliki suara dalam keputusan tentang tindakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Survei partisipasi oleh *The International Association of Publik Participation* telah mengidentifikasi nilai inti partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat meliputi jaminan bahwa kontribusi masyarakat akan mempengaruhi keputusan
- b. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan dan memenuhi kebutuhan proses semua partisipan
- c. Proses partisipasi masyarakat berupaya dan memfasilitasi keterlibatan mereka yang berpotensi untuk terpengaruh
- d. Proses partisipasi masyarakat melibatkan partisipan dalam mendefinisikan bagaimana mereka berpartisipasi
- e. Proses partisipasi masyarakat mengkomunikasikan kepada partisipan bagaimana input mereka digunakan atau tidak digunakan
- f. Proses partisipasi masyarakat memberi partisipan informasi yang mereka butuhkan dengan cara bermakna.

Indikator Partisipasi Masyarakat

Indikator partisipasi masyarakat menurut Keith Davis (dalam Sigalingging & Warjio, 2014) adalah:

- 1) **Pikiran**
Merupakan jenis keikutsertaan secara aktif dengan mengarahkan pikiran atau sebuah pengetahuan dalam suatu rangkaian untuk mencapai tujuan. Partisipasi menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- 2) **Tenaga**
Merupakan menggunakan tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun individu dengan tenaga yang dimilikinya melibatkan diri dalam suatu aktifitas untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.
- 3) **Pikiran dan tenaga**
Merupakan partisipasi yang sifatnya lebih luas, disamping mengikutsertakan aktifitas secara fisik dan fisik secara bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai tujuan yang sama .
- 4) **Keahlian**
Merupakan bentuk partisipasi dari individu atau kelompok yang mempunyai keahlian khusus, yang biasanya juga berlatar belakang pendidikan baik formal maupun non formal yang menunjang keahliannya. Keahlian menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan.
- 5) **Barang**
Merupakan jenis partisipasi dengan sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan. Partisipasi dari orang atau kelompok dengan memberikan barang yang dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 6) **Uang**
Merupakan partisipasi menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Partisipasi ini hanya memberikan sumbangan uang kepada kegiatan. Kemungkinan partisipasi ini terjadi karena orang atau kelompok tidak bisa terjun langsung dari kegiatan tersebut.

Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan menurut (Sjafrizal, 2014) adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan.

Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam (Riyadi & Bratakusumah, 2004) perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi. Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya dapat digunakan di daerah tertentu, dimana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan di daerah lain secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama.

Menurut M.L.L Jhingan dalam (Sjafrizal, 2014) (Mustanir, Ali, and Yasin 2018) perencanaan pembangunan adalah merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pengusaha (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan di jangka waktu tertentu pula. Arthur W. Lewis dalam (Mustanir and Abadi 2017) mendefinisikan perencanaan pembangunan suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (Riyadi & Bratakusumah, 2004) (Mustanir and Rusdi. Muhammad 2019).

Perencanaan pembangunan juga berlaku bagi negara-negara yang sedang berkembang, karena ada beberapa faktor, yaitu karena kegagalan mekanisme pasar, ketidakpastian masa datang, untuk mengarahkan kegiatan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang tak luput dengan mekanisme perencanaan pembangunan dengan adanya SPPN (system perencanaan pembangunan nasional) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Yang mana perencanaan pembangunan bukan hanya dilakukan pada tingkat pusat namun pada tingkat daerah juga.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan kerana pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Secara umum perencanaan pembangunan menurut (Sjafrizal, 2009) adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada didalamnya. Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan (Mustanir, Sellang, et al. 2018) (Latif, Mustanir, and Irwan 2019).

Jenssen dalam (Riyadi & Bratakusumah, 2004) (Sapri et al. 2019) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus

memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi. Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spatial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu ruang tertentu, sehingga diperlukan adanya penataan ruang yang efektif, dimana tata ruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya.

Perencanaan pembangunan berlaku pada negara yang menganut paham sosialis karena peranan pemerintah sangatlah besar sedangkan peranan sector swasta sangat dibatasi karena itu produksi barang dan jasa dilakukan melalui perusahaan milik pemerintah. Beda halnya dengan negara yang telah berkembang yang tidak menggunakan perencanaan pembangunan sebagai upaya untuk mendongkrak pembangunan mereka namun menggunakan sistem *invisible hand* atau mekanisme pasar.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksud untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi & Bratakusumah, 2004).

Cohen dan Uphoff dalam (Kogoya, Olfie, & Laoh, 2015) bahwa wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan itu bisa bermacam-macam seperti: kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Melihat dari tahapan pelaksanaan pembangunan, dimana partisipasi terbagi atas partisipasi langsung dan tidak langsung. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, misalnya dalam proyek pembangunan jalan, anggota masyarakat ikut serta dalam pekerjaan membangun jalan tersebut. Sedang partisipasi secara tidak langsung berupa bantuan dana dan material yang diperlukan.

Indikator Perencanaan Pembangunan

Indikator perencanaan pembangunan menurut (Sjafrizal, 2014) adalah

- a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembinaan merupakan keterpaduan antara pelaku pembangunan baik dalam institusi pemerintahan sendiri maupun pemerintahan antara pihak swasta dan masyarakat secara keseluruhan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah yaitu untuk mendorong proses pembangunan secara cepat dan efisien

- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan adalah untuk dapat mewujudkan pembangunan sesuai dengan apa yang telah direncanakan semula, perlu dijamin semaksimal mungkin terdapatnya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ialah bagaimana partisipasi masyarakat tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam perencanaan.

Menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif dan adil merupakan tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan dalam literatur adalah untuk menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya, baik dana tenaga secara efektif, efisien, dan adil.

Metode Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (*independen*) dan variabel terikat (*dependen*). Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas yakni peranan pemerintah Desa (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) sedangkan variabel terikatnya adalah perencanaan pembangunan (Y). Untuk menentukan ukuran besarnya sampel, peneliti menggunakan Rumus Yount dalam (Ahmad, 2015) dimana populasi berjumlah 547 dan respondennya adalah kepala keluarga. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuisisioner, dokumentasi, studi pustaka. Data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner dan kepustakaan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kuantitatif* menggunakan bantuan tabel frekuensi dan SPSS versi 21 *for windows*, dengan menggunakan skala likert sebagai alat ukur.

Pembahasan

Data mengenai tanggapan responden terhadap peranan pemerintah bisa dilihat dalam table berikut.

Tabel 1 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Peranan Pemerintah

No	Tanggapan Responden	Rata-Rata Skor	Rata-rata persentase %	Kategori
1	Pemecah Masalah	3,6	72 %	Berperan
2	Fasilitator	3,38	67,6 %	Berperan
3	Penghubung sistem	3,45	69 %	Berperan
4	Motivator	3,4	68 %	Berperan
5	Komunikator	3,12	62,4 %	Berperan
Jumlah		3,39	67,8	Berperan

Sumber hasil olahan data kuesioner 2019

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil rata-rata persentase dari 5 item pertanyaan pada indikator peranan pemerintah desa, maka hasil rata-rata persentase yang didapat adalah 67,8%.

Adapun total keseluruhan nilai dari Variabel X1 (Peranan Pemerintah Desa) adalah sebesar 933. Untuk mengetahui jumlah persentasenya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot tertinggi} \times \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\ &\quad \times 100\% \\ &= \frac{933}{5 \times 5 \times 55} = \frac{933}{1375} = 0,67 \times 100\% = 67\% \end{aligned}$$

Dari tabel 1 terdapat lima indikator dalam peranan pemerintah desa yang digunakan oleh peneliti. Adapun indikator yang pertama adalah pemecah masalah, yaitu pemerintah desa mencari jalan keluar yang dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 72% dengan kategori berperan.

Indikator kedua adalah fasilitator yaitu pemerintah desa mampu memfasilitasi masyarakat dan memiliki peran untuk membantu atau meringankan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 67,6% dengan kategori berperan.

Indikator ketiga adalah penghubung sistem yaitu pemerintah desa mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat misalnya dalam hal kegiatan gotong royong. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 69% dengan kategori berperan.

Indikator keempat adalah motivator yaitu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian pemerintah desa sebagai agen motivator mampu mendorong serta mengarahkan masyarakat untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 68% dengan kategori berperan.

Indikator kelima adalah komunikator yaitu pemerintah desa mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan proses pembangunan maupun informasi-informasi lainnya. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 62,4% dengan kategori berperan.

Dari kelima indikator peranan pemerintah desa, yang paling dominan adalah indikator pemecah masalah yakni 72%, hal ini berarti bahwa pemerintah Desa Timoreng Panua mampu berperan dalam membantu masyarakat untuk mencari jalan keluar dalam hal perencanaan pembangunan. Sedangkan indikator yang paling rendah yaitu indikator komunikator yakni 62,4%, hal ini berarti kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Salah satu hal yang menyebabkan kurangnya komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat yaitu pada zaman sekarang kegiatan gotong royong sudah sangat jarang dilakukan.

Dari hasil rekapitulasi mengenai peranan pemerintah didapatkan hasil 67,8% kategori berperan. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Laiccang (2017) mendapatkan mendapatkan hasil 65,8%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laiccang, karena berdasarkan dari lokasi yang berbeda dengan masyarakat yang mengisi angket (kuesioner).

Tabel 2 Model Summary X1 terhadap Y

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,524 ^a	,275	,261	3,233

a. Predictors: (Constant), Peranan Pemerintah Desa

Sumber Hasil Olahan data 2019

R adalah $0,524 \times 100\% = 52,4$ (pengaruh dari X1 terhadap Y). Sisanya: $100\% - 52,4 = 47,6$

Berdasarkan tabel model summary koefisien determinasi berganda (R^2) atau R squared = 0,524, berarti peranan pemerintah desa (X1) terhadap perencanaan pembangunan (Y) yaitu 52,4%. Atau dengan kata lain kategori cukup berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 52,4% sedangkan sisanya 47,6 dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 3 Anova X1 terhadap Y
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	209,942	1	209,942	20,083	,000 ^b
	Residual	554,058	53	10,454		
	Total	764,000	54			

a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan

b. Predictors: (Constant), Peranan Pemerintah Desa

Sumber Hasil Olahan data 2019

Berdasarkan hasil dari uji ANOVA di atas diketahui nilai signifikan untuk peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 20,083 > F_{tabel} 3,18$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan.

Tabel 4 Coefficient X1 terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,341	1,764		5,296	,000
1 Peranan Pemerintah Desa	,451	,101	,524	4,481	,000

a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan

Sumber Hasil Olahan data 2019

Berdasarkan nilai Coefficient di atas, untuk mengemukakan keputusan dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi < 0,05 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ 1,673 maka tidak ada pengaruh peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan. Pada tabel di atas diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan t_{hitung} 4,481 > 1,674, maka kesimpulannya adalah ada pengaruh secara signifikan peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan.

Tabel 5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Partisipasi Masyarakat

No	Tanggapan Responden	Rata-Rata Skor	Rata-rata persentase %	Kategori
1	Pikiran	3,47	69,4%	Antusias
2	Tenaga	3,32	66,4%	Antusias
3	Pikiran dan Tenaga	3,16	63,2%	Antusias
4	Keahlian	2,96	59,2%	Cukup Antusias
5	Barang	2,92	58,4%	Cukup Antusias
6	Uang	2,89	57,8%	Antusias
Jumlah		3,12	62,4 %	Antusias

Sumber hasil olahan data kuesioner 2019

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil rata-rata persentase dari 6 item pertanyaan pada indikator partisipasi masyarakat, maka hasil rata-rata persentase yang didapat adalah 62,4% dengan kategori “antusias”.

Adapun total keseluruhan nilai dari Variabel X2 (Partisipasi Masyarakat) adalah sebesar 1031. Untuk mengetahui jumlah persentasenya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot tertinggi} \times \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\ &\quad \times 100\% \\ &= \frac{1031}{5 \times 6 \times 55} = \frac{1031}{1650} = 0.62 \times 100\% = 62\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 5 terdapat enam indikator yang digunakan dalam partisipasi masyarakat yang digunakan oleh peneliti. Adapun indikator yang pertama adalah partisipasi pikiran yaitu, partisipasi berupa ide atau buah pikiran untuk merencanakan dan melaksanakan suatu pembangunan. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 69,4% dengan kategori antusias.

Indikator kedua adalah partisipasi tenaga yaitu, bentuk partisipasi dari masyarakat dalam berbagai kegiatan untuk melaksanakan usaha yang dapat menunjang suatu keberhasilan program kegiatan. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 66,4% dengan kategori antusias.

Indikator ketiga adalah pikiran dan tenaga yaitu, partisipasi yang bersifat lebih luas, karena selain memberikan ide atau pengalaman juga memberikan tenaga untuk menjalankan suatu kegiatan. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 63,2% dengan kategori antusias.

Indikator keempat adalah partisipasi keahlian yaitu, partisipasi dari masyarakat yang berbentuk keterampilan atau kemampuan dalam bidang tertentu. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 59,2% dengan kategori cukup antusias.

Indikator kelima adalah partisipasi barang yaitu, partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda atau alat-alat kerja untuk pembangunan desa. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 58,4% dengan kategori cukup antusias.

Indikator keenam adalah partisipasi uang yaitu, partisipasi yang biasa diberikan oleh seseorang untuk memperlancar suatu kegiatan. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 57,8% dengan kategori kurang berperan.

Dari hasil rekapitulasi mengenai partisipasi masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang didapatkan hasil 62,4% kategori antusias. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Wahyuddin (2018) mendapatkan hasil 73,3% dengan kategori baik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin, karena perbedaan dapat dilihat dari teori yang digunakan beserta dengan lokasi penelitian yang berbeda.

Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Perencanaan Pembangunan (Y)

Tabel 6. Model Summary X2 terhadap Y
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,770 ^a	,593	,585	2,423

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat
Sumber Hasil Olahan data 2019

R adalah $0,770 \times 100\% = 77\%$ (pengaruh X2 terhadap Y).

Sisanya $100\% - 77 = 23$

Berdasarkan tabel model summary koefisien determinasi berganda (R^2) atau R squared = 0,770, berarti partisipasi (X2) terhadap perencanaan pembangunan (Y) yaitu 77%. Atau dengan kata lain kategori cukup berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 77% sedangkan sisanya 23 dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 7. Anova X2 terhadap Y
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	452,757	1	452,757	77,098	,000 ^b
	Residual	311,243	53	5,873		
	Total	764,000	54			

a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat

Sumber Hasil Olahan data 2019

Berdasarkan hasil dari uji ANOVA di atas diketahui nilai signifikan untuk peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 77,089 > F_{tabel} 3,18$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Tabel 8. Coefficients X2 terhadap Y
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,311	1,260		5,007	,000
	Partisipasi Masyarakat	,570	,065	,770	8,781	,000

a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan

Sumber Hasil Olahan data 2019

Berdasarkan nilai Coefficient di atas, untuk mengemukakan keputusan dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel} 1,674$ maka tidak ada pengaruh peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan, sedangkan jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{table}$ maka ada pengaruh partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Pada tabel di atas diketahui nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} 8,781 > 1,674$, maka kesimpulannya adalah ada pengaruh secara signifikan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Tabel 9. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Perencanaan Pembangunan

No	Tanggapan Responden	Rata-Rata Skor	Rata-rata persentase %	Kategori
1	Mendukung koordinasi	3,43	68,6 %	Berperan
2	Terciptanya integrasi	3,50	70 %	Berperan
3	Konsisten	3,32	66,4 %	Berperan
4	Mengoptimalkan partisipasi masyarakat	3,34	66,8 %	Berperan
5	Menjamin terciptanya sumber daya	3,38	67,6 %	Berperan
Jumlah		3,39	67,88	Berperan

Sumber hasil olahan data kuesioner 2019

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan hasil rata-rata persentase dari 6 item pertanyaan pada indikator perencanaan pembangunan, maka hasil rata-rata persentase yang didapat adalah 67,88% dengan kategori “berperan”.

Adapun total keseluruhan nilai dari Variabel Y (Perencanaan Pembangunan) adalah sebesar 935. Untuk mengetahui jumlah persentasenya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot tertinggi} \times \text{Jumlah pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}} \\ &\quad \times 100\% \\ &= \frac{935}{5 \times 5 \times 55} = \frac{935}{1375} = 0.68 \times 100\% = 68\% \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel 9 terdapat lima indikator yang digunakan dalam perencanaan pembangunan yang digunakan oleh peneliti. Adapun indikator yang pertama adalah mendukung koordinasi yaitu, memberikan arahan terhadap proses pembangunan. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 68,6% dengan kategori berperan.

Indikator kedua adalah terciptanya integrasi. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 70% dengan kategori berperan. Indikator ketiga adalah konsisten yaitu, kemampuan untuk terus menurus berusaha untuk mencapai hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 66,4% dengan kategori berperan.

Indikator keempat adalah partisipasi masyarakat yaitu, keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 66,8% dengan kategori berperan.

Indikator kelima adalah menjamin terciptanya sumber daya yaitu, tercapainya sumber daya secara efisien, efektif dan adil merupakan tujuan dan fungsi utama dari perencanaan pembangunan dalam literatur adalah untuk menjamin terwujudnya penggunaan sumber daya, baik dana tenaga secara efektif, efisien, dan adil. Dari hasil rata-rata persentase didapatkan 67,6% dengan kategori berperan.

Dari hasil rekapitulasi mengenai perencanaan pembangunan di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang didapatkan hasil 67,88% kategori berperan. Dari kelima indikator perencanaan pembangunan, indikator yang paling dominan adalah indikator terciptanya integrasi yakni 70%, dan yang indikator yang paling rendah adalah indikator konsisten yakni 66,4%. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh (Sigalingging & Warjio, 2014) indikator yang paling rendah adalah indikator partisipasi masyarakat Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrenbang belum mewakili seluruh masyarakat kecamatan Sidikalang. Keterbatasan masyarakat terhadap pemahaman perencanaan pembangunan. Selain itu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang seharusnya hadir. Ada stigma negatif masyarakat bahwa musrenbang hanyalah acara seremonial belaka yang membuang-buang waktu dan dana saja.

Peranan pemerintah desa (X1) dan partisipasi masyarakat (X2) terhadap perencanaan pembangunan (Y)

Tabel 10. Model Summary X1 dan X2 Terhadap Y
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,784 ^a	,615	,600	2,379

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Peranan Pemerintah Desa
Sumber Hasil Olahan data 2019

R adalah $0,784 \times 100\% = 78,4$ (pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y) sisanya $100\% - 78,4 = 21,6$

Berdasarkan tabel model summary koefisien determinasi berganda (R^2) atau R squared = 0,784, berarti peranan pemerintah desa (X1) dan partisipasi (X2) terhadap perencanaan pembangunan (Y) yaitu 78,4%. Atau dengan kata lain kategori berpengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 78,4% sedangkan sisanya 21,6% dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 11. Anova X1 dan X2 Terhadap Y
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	469,613	2	234,807	41,476	,000 ^b
Residual	294,387	52	5,661		
Total	764,000	54			

a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Peranan Pemerintah Desa
Sumber Hasil Olahan data 2019

Tabel di atas menjelaskan tentang hasil uji F yang digunakan unruk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil dari uji ANOVA di atas diketahui nilai signifikan adalah $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 41,476 > F_{tabel} 3,18$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Tabel 12. Coefficients X1 dan X2 Terhadap Y
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,019	1,446		3,470	,001
1 Peranan Pemerintah Desa	,149	,087	,173	1,726	,090
Partisipasi Masyarakat	,504	,074	,680	6,773	,000

a. Dependent Variable: Perencanaan Pembangunan

Sumber Hasil Olahan data 2019

Untuk mengambil keputusan dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{table}$ maka terdapat pengaruh secara signifikan peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Diketahui nilai signifikansi untuk variabel peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan $0,01 < 0,05$ dan $t_{hitung} 3,470 > t_{table} 1,674$ jadi kesimpulannya ada pengaruh antara peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Persamaan Regresi Linear Berganda-nya adalah sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2$$

Persamaan regresi linear berganda berdasarkan output tabel coefficient hasil perhitungan SPSS versi 20

$$Y = 5,019 + 0,149 X_1 + 0,504 X_2$$

Bila X_1 dan $X_2 = 0$ (nol), maka $Y = 5,019$

Bila X_1 dan $X_2 = 1$, maka $Y = 5,019 + 0,149 + 0,504$

$$Y = 5,672$$

Hal ini menunjukkan bahwa, variabel X_1 (peranan pemerintah desa) dan variabel X_2 (partisipasi masyarakat) berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan.

Karena nilai Y , pada saat X_1 dan $X_2 = 1$ adalah $Y = 5,672$ lebih besar dari Nilai Y , pada saat X_1 dan $X_2 = 0$

1. Uji Hipotesis

$$H_a : P = 0$$

$$H_0 : P = 0$$

a. Perumusan Hipotesis

a) Hipotesis H1 : ada pengaruh Peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan

b) Hipotesis H0 : tidak ada pengaruh peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan

b. Dasar pengambilan keputusan

a) Uji t

1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y

2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y

(a). Tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05/2 = 0,025$)

(b). Df atau dk (derajat kebebasan) = jumlah data - 2 atau $55-2 = 53$

(c). Sehingga didapat $t_{tabel} = 1,674$

b) Uji F

1) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, atau $t_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y

2) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ atau $t_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap Y

Rumus :

$$Df (n1) = k-1$$

$$= 3-1 = 2$$

$$Df (n2) = n-k$$

$$= 55 - 3 = 52$$

Jadi F_{tabel} adalah 3,18.

2. Kaidah keputusan

Ada pengaruh peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang atau H1 diterima, H0 ditolak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Peranan pemerintah desa terhadap perencanaan pembangunan di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 52,4% dengan kategori cukup berperan

2. Pengaruh Partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 77% dengan kategori berperan.

3. Sedangkan pengaruh peranan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 78,4% dengan kategori berperan.

Daftar Pustaka

- Adisamita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ahmad, J. 2015. *Metode penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gama Media.
- Akhmad, Israwaty, Ahmad Mustanir, and Muhammad Rohady Ramadhan. 2018. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang." In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA). Jilid 2. Sosial Politik Dan Ekonomi*, , 89–103. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/konferensi-appptm-ke-7-meningkatkan-kualitas-dan-kuantitas-jurnal-ilmiah>.
- Andreeyan, R. 2014. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara* , 1941.
- Arifin, Z. 2010. *Evaluasi Pembelajaran Teknik Pemerintahan Desa*. Bandung: Rosdakarya.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Damis Dadda, Andi, Ahmad Mustanir, Andi Nilwana, and Jamaluddin Ahmad. 2019. "Pengaruh Kepemimpinan Lurah Perempuan Terhadap Stabilitas Kamtibmas Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang." In *Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 378–83. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>.
- Fadil, F. 2013. Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Pemabngunan Pembangunan di Kelurahan KotaBaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* , 253-255.
- Gito Saputro, S., & Rangga, R. K. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Konsep, Teori dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanif, N. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.
- Irwan, Irwan et al. 2019. "Gaya Kepemimpinan, Kinerja Aparatur Sipil Negara Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kecamatan Kulo

- Kabupaten Sidenreng Rappang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis* 5(1): 32–43.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1900>.
- Isbandi. 2007. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E. 2015. Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Lanny Jaya-Papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 5.
- Kholifah R, Emy, and Ahmad Mustanir. 2019. "Food Policy and Its Impact on Local Food." *Journal of Asian Review of Public Affairs and Policy (ARPAP)* 4(3): 1–15. <https://arpap.kku.ac.th/index.php/arpap/article/view/171>.
- Laiccang. (2017). Peranan Pemerintah dan Partisiapsi Masyarakat terhadap Pembangunan di Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Skripsi*, 55-67.
- Latif, Adam et al. 2019. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Ciamis* 5(1): 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>.
- Latif, Adam, Ahmad Mustanir, and Irwan Irwan. 2019. "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan." *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik)* 5(2): 144–64. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/7977>.
- Mardikanto, T., & Poerwoko, S. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustanir, Ahmad, Herman Dema, et al. 2018. "Pengaruh Motivasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Di Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2(1): 27–39. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/212>.
- Mustanir, Ahmad, Kamaruddin Sellang, et al. 2018. "Peranan Aparatur Pemerintah Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Tongronge Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Ilmiah Clean Government (JCG)* 2(1):67-84. 67-84. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/clean/article/view/213>.
- Mustanir, Ahmad et al. 2019. "Kepemimpinan Lurah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lautang Benteng Kabupaten Sidenreng Rappang." *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* 1(2): 20–39. <https://journal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/5460>.
- Mustanir, Ahmad, and Partisan Abadi. 2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Politik Profetik*

- 5(2): 247–61. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/viewFile/4347/3986>.
- Mustanir, Ahmad, Partisan Abadi, and A Nasri. 2016. "Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan." In *International Conference on Ethics in Governance (ICONEG 2016)*, Makassar: Atlantis Press, 356 – 359. <https://www.atlantispress.com/proceedings/iconeg-16/25874276>.
- Mustanir, Ahmad, Akhwan Ali, Akhmad Yasin, Budiman. 2018. "Transect on Participatory Development Planning in Sidenreng Rappang Regency." In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Maka.
- Mustanir, Ahmad, Sandi Lubis, and Barisan; Barisan. 2017. "Participatory Rural Appraisal in Deliberations of Development Planning." In *International Conference On Democracy, Accountability, and Governance (ICODAG 2017)*, Pekanbaru: Atlantis Press, 316–19. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icodag17/articles?q=DELIBERATIONS>.
- Mustanir, Ahmad, and M Rais Rahmat Razak. 2017. "Nilai Sosial Budaya Pada Partisipasi Masyarakat Etnik Towani Tolotang Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan." In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-6 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, Pare Pare: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1–7. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-6>.
- Mustanir, Ahmad, and Rusdi. Muhammad. 2019. "Participatory Rural Appraisal (PRA) Sebagai Sarana Dakwah Muhammadiyah Pada Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Sidenreng Rappang." In *Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, Medan: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 378–83. <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>.
- Mustanir, Ahmad, and Akhmad Yasin. 2018. "Community Participation in Transect on Development Planning." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik (JIAP)* 8(2): 137–46. <http://ojs.unm.ac.id/iap>.
- Mustanir, Ahmad, Akhmad Yasin, Irwan Irwan, and Muhammad Rusdi. 2018. "Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4(4): 1–14. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1775>.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Saidiman, Saidiman, Sandi Lubis, Muhammad Rais Rahmat Razak, and Ahmad Mustanir. 2019. "Pengaruh Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang." In *Prosiding Konferensi Nasional Ke-9 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)*, Malang: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 525-40. <http://www.appptma.org/wp-content/uploads/2020/02/525-2686-4312.pdf>.
- Sapri, Sapri et al. 2019. "Peranan Camat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5(2): 33-48.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2127>.
- Sellang, K. Ahmad, J. Mustanir, A (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ombak.
- Sigalingging, A. H., & Warjio. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, 125.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (2009). *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Padang: Baduose Media.
- Soekarwati. (2000). *Pengantar Agroindustri*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.
- Theresia, A. d. (2015). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Uceng, Andi, Akhwan Ali, Ahmad Mustanir, and Nirmawati Nirmawati. 2019. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang." *Jurnal MODERAT* 5(2): 1-17. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2125>.
- Wahyuddin. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. *Ilmu Ekonomi*, 67.
- Wirawan, R., Mardiyono, & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 304.
- Wrihatnolo, & Nugroho. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia (sebuah pengantar dan panduan)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Zainuddin. (2017). *Teori-Teori Mutakhir Dalam Perspektif Ilmu Administrasi Publik*. Makassar: Phinatama Media.